

**Dinamika ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Politik Pasca-Kudeta Militer  
Myanmar 2021**

**Raynor Argaditya**

**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

[raynor.arga@gmail.com](mailto:raynor.arga@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang dinamika ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 menggunakan teori regionalisme dan konsep kudeta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif oleh John W. Creswell dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis wawancara. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa ASEAN gagal karena prinsip non-interferensi yang dianut menghalangi tanggung jawab ASEAN terhadap Myanmar dan perlu memprioritaskan prinsip lain, yaitu supremasi hukum, tata kelola yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional. Selain itu, ASEAN tetap berkomitmen untuk mendukung Myanmar dalam upayanya untuk kembali ke keadaan normal sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar, mengingat salah satu poin yang terkandung dalam Konsensus Lima Poin (5PC) adalah menyerukan dialog yang konstruktif antara semua pihak demi meraih solusi damai.

Kata Kunci: ASEAN, Myanmar, regionalisme, kudeta, non-interferensi

**Abstract**

This study discusses ASEAN dynamics to settle the political crisis that occurred in Myanmar after the 2021 military coup. In addition, this study uses qualitative method

by focusing on data in the field. Regionalism theory is used to study regional organizational policies. The coup concept examines the impact of the coup so as to move ASEAN to be actively involved. The research method used is a qualitative method by John W. Creswell using primary and secondary data sources. Researchers used two data analysis techniques, namely descriptive analysis and interview analysis. In this study, it was concluded that ASEAN failed due to the adhered to non-interference principle became an obstacle to ASEAN's responsibility towards Myanmar and it was necessary to prioritize other principles, namely the rule of law, good governance, democratic principles, and constitutional government. In addition, ASEAN remains committed to supporting Myanmar in its efforts to return to normal conditions in accordance with the wishes of the people of Myanmar, bearing in mind that one of the points contained in the Five-Point Consensus (5PC) is calling for constructive dialogue between all parties in order to achieve a peaceful solution.

Keywords: ASEAN, Myanmar, coup, qualitative, non-interference

## **Pendahuluan**

Sebelum tahun 2021, Myanmar (sebelumnya Burma) pernah berada di bawah kekuasaan militer selama dua kali, yaitu di bawah Partai Program Sosialis Burma (*Burma Socialist Programme Party/BSPP*) yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win (1962-1988) dan di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (*State Peace and Development Council/SPDC*, 1988-2011). Pada tanggal 1 Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan Panglima Tertinggi Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) melancarkan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih demokratis dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Motivasi Min Aung Hlaing dalam melancarkan kudeta adalah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai politik Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dalam pemilu yang diadakan pada November 2020, dimana NLD

memenangkan 920 (82 persen) dari total 1.117 kursi terpilih yang diperebutkan secara nasional, sementara partai proksi Tatmadaw, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), hanya memperoleh 71 kursi (6,4 persen) dari kursi terpilih.

Kudeta ini memulihkan kekuasaan militer penuh di Myanmar setelah periode demokratisasi dan liberalisasi yang dimulai pada tahun 2011, ketika seorang mantan jenderal Angkatan Darat Myanmar, Thein Sein untuk pertama kalinya terpilih secara demokratis sebagai presiden Myanmar, melaksanakan reformasi parlementer, dan membuka Myanmar kepada investasi asing dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar yang digulingkan, ditahan dan menghadapi berbagai tuduhan bermotif politik, seperti melanggar aturan Covid-19, korupsi, dan mengimpor *walkie-talkie* secara ilegal (Goldman, 2022).

Sebelum kudeta 2021, Myanmar diperintah berdasarkan pengaturan pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer, di bawah Konstitusi 2008, yang memastikan bahwa militer tidak pernah berada di bawah wewenang sipil dan mencadangkan 25 persen kursi parlemen, tiga portofolio menteri utama (pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan), dan salah satu jabatan wakil presiden. Militer berharap pengaturan ini mampu mempertahankan pengaruhnya dalam politik domestik Myanmar, tetapi pemilu November 2020 membuktikan bahwa keseimbangan telah bergeser. Dalam beberapa minggu menjelang kudeta, Min Aung Hlaing menyatakan dukungannya untuk klaim kecurangan pemilu oleh USDP, namun Komisi Pemilu Myanmar (*Union Election Commission/UEC*) tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung klaim ini.

Tatmadaw memproklamkan dirinya sebagai penjaga solidaritas, persatuan, dan kedaulatan nasional dengan ‘kewajiban dan hak’ untuk memerintah Myanmar. Kemenangan NLD dalam pemilu November 2020 berpotensi membahayakan kepentingan bisnis Tatmadaw yang cukup besar serta pengaruh politiknya. Min Aung Hlaing seharusnya pensiun pada Juli 2021 dan kudeta militer 1 Februari 2021 mampu memperpanjang kekuasaan politik dan jaringan patronasinya, yang meliputi bisnis keluarga yang menguntungkan dan luas. Pemilu baru juga dianggap memudahkan Hlaing dalam meraih kepresidenan (ambisinya yang sudah lama terpendam) jika USDP

berhasil memenangkan sepertiga kursi dan menghindari penuntutan di mahkamah internasional atas perannya dalam kekejaman militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine, Kachin, dan Shan (BBC, 2021).

Jutaan orang di seluruh negeri Myanmar turun ke jalan untuk menentang kekuasaan junta militer yang baru, Dewan Administrasi Negara (*State Administration Council/SAC*), yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Ketika demonstrasi damai pro-demokrasi berjalan (metode yang paling terkemuka adalah memukul panci (*pot-banging*) dan salam tiga jari (*three-finger salute*)), aparat junta membalasnya dengan cara kekerasan, seperti menembakkan peluru tajam pada para pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Pada Juni 2021, setidaknya 887 orang diperkirakan telah tewas dan lebih dari 6.000 ditangkap oleh junta militer sejak kudeta.

Pada April 2021, para anggota parlemen Myanmar yang digulingkan dan perwakilan beberapa partai politik etnis membentuk pemerintahan paralel, Pemerintah Persatuan Nasional (*National Unity Government/NUG*) untuk menyinkronkan perlawanan terhadap kudeta militer Tatmadaw dan menciptakan titik temu untuk memperoleh dukungan dan pengakuan masyarakat internasional sebagai pemerintahan sah Myanmar. Pada bulan yang sama, pemerintahan SAC menetapkan NUG sebagai organisasi teroris dan mengumumkan bahwa 24 menteri kabinet dan wakil menteri NUG telah didakwa dengan tuduhan makar dan perkumpulan ilegal (*The Straits Times*, 2021).

Kudeta militer 2021 membawa gejolak ekonomi dan menghapuskan pencapaian sederhana dalam pengurangan kemiskinan yang dicapai selama satu dekade terakhir di Myanmar. Perekonomian nasional menyusut hampir 20 persen pada tahun 2021. Selain itu, sistem perawatan kesehatan runtuh di tengah pandemi Covid-19. Jutaan orang menghadapi kelaparan dan puluhan ribu telah melarikan diri ke daerah lain di Myanmar atau melintasi perbatasan ke India dan Thailand. Bahkan (Kurlantzick, 2021) mengatakan bahwa Myanmar telah menjadi negara gagal (*failed state*) akibat kudeta.

## **Konsep dan Teori Penelitian**

- **Konsep Kudeta**

Menurut (Powell et al, 2011), definisi kudeta adalah “upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elite lain dalam aparaturnegara untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat.” Dengan demikian, menurut definisi ini, hanya upaya untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat dapat dianggap sebagai kudeta. Definisi tersebut juga memungkinkan terjadinya kudeta yang tidak didalangi oleh militer (yang dapat disebut sebagai kudeta militer), tetapi dilakukan oleh elite mana pun yang merupakan bagian dari hierarki negara. Mampu atau tidaknya dalang kudeta untuk mempertahankan kekuasaan mereka setidaknya selama tujuh hari sering digunakan untuk membedakan kudeta yang berhasil dan yang gagal.

Dengan berakhirnya absolutisme dan penetapan prinsip kedaulatan rakyat di abad ke-17, yang memisahkan penguasa dari negara, konsep kudeta berubah menjadi seperti yang dikenal sekarang (Bartelson, 1997). Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Luttwak yang mendefinisikan kudeta sebagai “penyusupan segmen kecil tapi kritis dari aparaturnegara yang digunakan untuk menggulingkan pemerintah dari kendali yang tersisa” (Luttwak, 1969: 12).

Akibat kudeta militer 2021, pertumbuhan dan produktivitas faktor-faktor produksi (modal manusia dan fisik) yang menjadi tulang punggung negara Myanmar berkurang, sehingga mengurangi pengembalian investasi atas modal ekonomi. Lebih jauh, efek destruktif dari kudeta militer menaikkan tingkat depresiasi modal di negara Asia Tenggara tersebut.

Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan, kekurangan arus kas, dan kesulitan dalam mengakses layanan perbankan dan internet, yang merugikan tenaga kerja dalam perekonomian di mana dampak gabungan dari kudeta dan pandemi Covid-19 merugikan Myanmar sekitar 1,6 juta pekerjaan pada tahun 2021. Sektor konstruksi, garmen, pariwisata, dan perhotelan mengalami kehilangan pekerjaan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 31 persen, 27 persen, dan 30 persen.

- **Regionalisme**

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah regionalisme. (Winters, 1999) mendefinisikan regionalisme sebagai ‘setiap kebijakan yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan antara beberapa negara, terlepas dari apakah negara-negara tersebut benar-benar berdekatan atau bahkan dekat satu sama lain.’ Kecenderungan untuk menyebut kawasan sebagai ‘blok perdagangan’ terlalu menekankan aspek perdagangan dari regionalisme dan kata ‘blok’ menyiratkan sifat defensif (Cable et al, 1994). Karena kurang lebih baik, sebagian besar penulis mendefinisikan suatu kawasan dalam hal kedekatan geografis (Mansfield et al, 1997). (Cohen, 1997), di sisi lain, menekankan mata uang bersama sebagai dasar regionalisme. Regionalisme dapat merujuk secara longgar pada semakin banyaknya hubungan integrasi dengan intensitas yang berbeda-beda antara setiap negara-bangsa (Dent, 1997), tetapi paling baik dicontohkan dengan meningkatnya jumlah perjanjian integrasi regional (RIA) baru di seluruh dunia selama tahun 1990-an (Atkinson, 1999).

Upaya yang lebih baru untuk mencapai integrasi regional dimulai pada tahun 1960-an, ketika banyak negara berkembang mencoba mengambil keuntungan dari keunggulan komparatif dan pasar yang lebih besar sambil melindungi pasar mereka dari perdagangan global melalui industrialisasi substitusi impor (ISI). Ketika strategi ISI dapat dilihat dalam konteks pembagian dunia era Perang Dingin, gagasan ketergantungan Dunia Ketiga, dan kekhawatiran akan kebangkitan sentimen nasionalis, gelombang kedua menghasilkan lapisan kompleksitas tambahan pada fenomena regionalisme.

Akibatnya, ‘regionalisme baru’ ini (Mansfield et al, 2000) mendapat perhatian baru dari kalangan akademis. Meskipun ada banyak dan beragam literatur, ‘bagaimana dan mengapa’ tetap kurang dipahami (Hettne et al, 2000). Perdebatan berpusat pada keuntungan kesejahteraan dan implikasi regionalisme (terutama konsekuensi multilateralisme), dalam situasi apa suatu

negara terlibat dalam Perjanjian Integrasi Regional (RIA), serta mengapa dan kapan integrasi mengambil bentuknya.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap ancaman internal dan eksternal lingkungannya. Konteks lingkungan saat itu adalah terjadinya Perang Dingin yang dimulai dari tahun 1947 hingga sekitar tahun 1989 setelah berakhirnya Perang Dunia II, dimana hanya dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer global yang luas, sehingga “persaingan adikuasa” menjadi ciri utama politik global kala itu.

Faktor identitas regional tidak dapat dipisahkan dari visi membangun ASEAN mengingat perbedaan sejarah dan budaya negara-negara ASEAN, selain nasib bersama yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, karena dapat memperkuat organisasi yang baru terbentuk saat itu. Hampir semua negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Singapura dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol, Brunei Darussalam dijajah oleh Inggris, Vietnam dijajah oleh Prancis, Kamboja dijajah oleh Prancis, Myanmar (Burma) dijajah oleh Inggris, dan Laos dijajah oleh Prancis.

Tanggapan ASEAN terhadap lingkungan spesifiknya tercermin dengan sangat jelas dalam tujuan utama Deklarasi Bangkok, yaitu memulihkan dan menyalurkan kembali hubungan intra-regional dan menyusun struktur tatanan baru Asia Tenggara berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apa pun kondisi sistem sosial dan politik negara-negara anggotanya. Melalui struktur baru ini, ASEAN ingin meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial budaya: “mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan guna memperkuat landasan bagi

kesejahteraan dan perdamaian masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara.” (Deklarasi Bangkok, 1967).

Meskipun dinyatakan bahwa tujuan ekonomi lebih menonjol daripada “memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan”, namun para pendiri ASEAN yakin bahwa ada ikatan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kerja sama di satu sisi dan perdamaian dan stabilitas di sisi lain. Premis dasar ASEAN ini telah dirumuskan sebagai sikap terpadu dalam ekonomi serta kerja sama politik-keamanan dan hal ini secara khusus tercermin dalam sebagian besar dokumen ASEAN seperti Deklarasi Bangkok, Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif oleh John W. Creswell. Ciri-ciri metode kualitatif adalah mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan desain yang beragam. (Creswell, 2014).

Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif; penanya biasanya terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan intensif dengan peserta. Berbagai isu strategis, etis, dan pribadi diperkenalkan ke dalam proses penelitian kualitatif (Locke et al, 2013). Dengan pertimbangan ini, penanya secara eksplisit mengidentifikasi secara refleksi bias, nilai, dan latar belakang pribadi mereka, seperti jenis kelamin, sejarah, budaya, dan status sosial ekonomi yang membentuk interpretasi mereka selama penelitian. Selain itu, mendapatkan akses ke situs penelitian dan masalah-masalah etika yang mungkin muncul juga merupakan elemen dari peran peneliti.

Data kualitatif penting dalam menentukan frekuensi ciri atau karakteristik tertentu. Ini memungkinkan ahli statistik atau peneliti untuk membentuk parameter di mana kumpulan data yang lebih besar dapat diamati. Ini menyediakan sarana bagi pengamat agar dapat mengukur dunia di sekitar mereka. Data kualitatif juga adalah tentang emosi atau persepsi orang, serta apa yang mereka rasakan.



## Pembahasan

Gambar 1. Demonstrasi Anti-Kudeta di Mandalay, Myanmar



Sumber: The Japan Times

Untuk menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar yang semakin memburuk, ASEAN mengumumkan Konsensus Lima Poin (*Five-Point Consensus/5PC*). Berikut adalah ketentuan dari Konsensus Lima Poin.

- 1) Menghentikan kekerasan dengan segera dan menyerukan kepada semua pihak yang bertikai agar menahan diri sepenuhnya.
- 2) Memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
- 3) Mengangkat utusan khusus Ketua ASEAN untuk mempermudah proses mediasi dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
- 4) Mengirim bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (*AHA Centre*).
- 5) Kunjungan utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait (*Human Rights Watch, 2022*).

Yanghee Lee, mantan Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan bahwa Konsensus Lima Poin gagal karena blok regional tersebut mengambil keputusan yang salah, yaitu memilih untuk mengadakan

pembicaraan dengan SAC alih-alih NUG. Lee yang merupakan anggota Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M) menambahkan bahwa NUG mewakili Myanmar secara sah dan pantas untuk melakukan *engagement* dengan ASEAN. “NUG menunjukkan bahwa mereka adalah mitra konstruktif yang dibutuhkan ASEAN untuk meraih kemajuan dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” tambah Lee (Lee, 2022). Namun, ASEAN terus memberlakukan 5PC sebagai cetak biru untuk pemulihan demokrasi Myanmar.

### **Kesimpulan**

ASEAN belum berhasil dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 karena dua alasan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Prinsip non-interferensi. Menteri luar negeri Singapura bahkan menyatakan bahwa “ketidaksetujuan terhadap kudeta ... tidak memberikan izin kepada ASEAN untuk ikut campur.” Indonesia telah mengatakan bahwa ASEAN harus menangani krisis di Myanmar dan bahwa sebagai Ketua ASEAN akan berusaha untuk mendorong terselenggarakannya dialog nasional yang inklusif di Myanmar. Mengingat adanya kendala dan perpecahan internal ASEAN, Indonesia menghadapi perjuangan yang berat.
- 2) Prinsip konsultasi (konsensus). Ada masalah dalam penyesuaian prinsip konsensus di Myanmar, dimana ASEAN harus terus mendorong penyelesaiannya. Sama seperti pembahasan kode tata berperilaku (CoC) di Laut Tiongkok Selatan, tidak ada solusi yang cepat. Isu Myanmar sangat sensitif dan semua langkah yang diambil ASEAN harus menghindari risiko pertumpahan darah warga sipil.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Manurung, H. (2021). *Myanmar Political Instability: A Threat to Southeast Asia Stability*. Jurnal Asia Pacific Studies, Vol. 5, No. 1. DOI: 10.33541/japs.v5i1.2671
- Gassebner, M., Gutmann, J., & Voigt, S. (2016). *When to expect a coup d'état? An extreme bounds analysis of coup determinants*. ILE Working Paper Series, No. 3, University of Hamburg, Institute of Law and Economics (ILE), Hamburg. <http://hdl.handle.net/10419/156099>
- Mahaseth, H. & Tulsyan, A. (2022). *The Myanmar Coup and the Role of ASEAN*. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4021075>
- Mangır, D.Ş. & Ramiz, L. (2020). *Indonesia and Regionalism in Southeast Asia, ASEAN and Indonesian Foreign Policy*. Journal of Academic Perspective on Social Studies, Vol. 1. <https://doi.org/10.35344/japss.633421>
- Cheak, P. S. F. (2008). *ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar (Burma)* (Master's thesis). U.S. Army Command and General Staff College.
- Dunst, C. (2021). *The Myanmar Coup as an ASEAN Inflection Point*. Journal of Indo-Pacific Affairs. <https://media.defense.gov/2021/Aug/26/2002840264/-1/-1/1/DUNST.PDF>
- Fauziah, S. G. & Padmi, M. F. M. (2022). *The Myanmar Military Coup in 2021 and the Future of Democracy*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 5, No. 3. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5852>
- King, A. S. (2022). *Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government*. Religions. Vol. 13, No. 594. <https://doi.org/10.3390/rel13070594>

- Devi, K. S. (2014). *Myanmar under the Military Rule 1962-1988*. International Research Journal of Social Sciences. Vol. 3, No. 10. <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf>
- Win, S. S. (2019). *Political Development in Myanmar since 2011*. Dagon University Research Journal, Vol. 10. <https://www.dagonuniversity.edu.mm/wp-content/uploads/2019/08/005-IR-San-San-Win-Dr-1.pdf>
- Radtke, K. (2014). *ASEAN Enlargement and Norm Change – A Window of Opportunity for Democracy and Human Rights Entrepreneurs?* Journal of Current Southeast Asian Affairs. Vol. 33, No. 3. <https://doi.org/10.1177/186810341403300304>
- Thida, H. M. (2021). *People's Perception of the Role of Foreign Power in Myanmar: A Case Study of the 2021 Military Coup*. Foreign Policy Review, Vol. 14, No. 3. <https://doi.org/10.47706/KKIFPR.2021.3.127-140>
- Seethi, K. M. (2021). *Military coup in Myanmar: 'Garrison State' back to dismantle democracy?* Global South Colloquy, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13697578.v1>
- Marsteintredet, L. & Malamud, A. (2019). *Coup with Adjectives: Conceptual Stretching or Innovation in Comparative Research?* Political Studies Association. Vol. 68, No. 4. <https://doi.org/10.1177/0032321719888857>
- Herindrasti, V. L. S. (2010). *ASEAN Role and Regionalism in Southeast Asia*. Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik. Vol. 11, No. 31. <https://doi.org/10.33541/sp.v11i31.675>
- Tekunan, S. (2015). *The Asean Way: The Way To Regional Peace?* Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0056.142-147>
- Leonard, A. E. (2019). *The ASEAN Way to Asia-Pacific Security Community*. Jurnal Sentris Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional. Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4162.22-31>

Kim, H. J. (2007). *ASEAN Way and Its Implications and Challenges for Regional Integration in Southeast Asia*. Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 12.

### **Artikel Online**

Human Rights Watch. (2022, 22 April). *Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On*. <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>

The Irrawaddy. (2021, 27 Juli). *Myanmar Junta Officially Annuls NLD's 2020 Election Win*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-officially-annuls-nlds-2020-election-win.html>

Aljazeera. (2020, 13 November). *Aung San Suu Kyi's party confirmed winner in Myanmar election*. <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/aung-san-suu-kyis-party-confirmed-winner-in-myanmar-election>

Reuters. (2021, 21 Oktober). *ASEAN should rethink non-interference policy amid Myanmar crisis, Malaysia FM says*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-should-rethink-non-interference-policy-amid-myanmar-crisis-malaysia-fm-2021-10-21/>

United Nations. (2017, 11 September). *UN human rights chief points to 'textbook example of ethnic cleansing' in Myanmar*. <https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar>

Council on Foreign Relations (CFR). (2022, 11 April). *What is ASEAN?* <https://www.cfr.org/backgrounder/what-asean>

Council on Foreign Relations (CFR). (2022, Februari). *The Revival of Military Rule in South and Southeast Asia*. <https://www.cfr.org/report/revival-military-rule-south-and-southeast-asia>

- Hazmi, A. (2020, 21 Januari). *What is “ASEAN Way”?* Good News from Southeast Asia. <https://seasia.co/2020/01/21/what-is-asean-way>
- Molthof, M. (2012, 8 Februari). *ASEAN and the Principle of Non-Interference*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>
- Nguyen, H. H. (2012, 27 Juli). *Time to reinterpret ASEAN’s consensus principle*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2012/07/27/time-to-reinterpret-asean-s-consensus-principle/>
- Clare, A. (2021, 2 Juli). *The Myanmar coup: a quick guide*. Parliament of Australia. [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp2122/Quick\\_Guides/MyanmarCoup](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup)
- Goodman, J. (2021, 5 Februari). *Myanmar coup: Does the army have evidence of voter fraud?* BBC. <https://www.bbc.com/news/55918746>
- Reuters. (2022, 25 Januari). *Myanmar’s year of turmoil since the military took power in a coup*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-year-turmoil-since-military-took-power-coup-2022-01-25/>
- Reuters. (2019, 25 Januari). *Myanmar army chief must be prosecuted for Rohingya ‘genocide’: U.N. rights envoy*. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un-idUSKCN1PJ1AK>
- Kumbun, J. (2021, 18 Februari). *Myanmar’s fundamental problem: the 2008 constitution*. Asia Times. <https://asiatimes.com/2021/02/myanmars-fundamental-problem-the-2008-constitution/>
- Sun, Y. (2022, 1 Februari). *One year after Myanmar’s coup, old and new resistance is undermined by divisions*. Brookings. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/one-year-after-myanmars-coup-old-and-new-resistance-is-undermined-by-divisions/>

- Thuzar, M. (2021, 20 Oktober). *Commentary: Is ASEAN's snub to Myanmar military the start of a new approach?* Channel News Asia. <https://www.channelnewsasia.com/commentary/asean-myanmar-protest-military-government-nug-sac-min-aung-hlaing-un-2254311>
- BBC. (2021, 6 Desember). *Aung San Suu Kyi: Myanmar democracy icon who fell from grace.* <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977>
- Maizland, L. (2022, 31 Januari). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict.* Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>
- Ryu, Y., Minn, B., & Mon, M. M. (2021, 10 Maret). *The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values.* ISEAS Yusof Ishak Institute. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-27-the-military-coup-in-myanmar-time-to-prioritise-asean-centrality-and-communal-values-by-yongwook-ryu-bernard-minn-and-myat-myat-mon/>
- Nouwens, V. & Dave, A. (2021, 2 Februari). *Myanmar's Military Coup: International Reactions.* RUSI. <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/myanmars-military-coup-international-reactions>
- Banerjee, S. (2022, 7 Juni). *The Myanmar crisis: Escalating humanitarian emergencies.* Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-myanmar-crisis-escalating-humanitarian-emergencies/>
- European Institute for Asian Studies (EIAS). (2021, 17 Agustus). *Myanmar's humanitarian crisis: What role for the international community?* <https://eias.org/policy-briefs/myanmars-humanitarian-crisis-what-role-for-the-international-community/>

- BBC. (2021, 1 Februari). *Myanmar coup: Min Aung Hlaing, the general who seized power*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55892489>
- Sullivan, D. (2021, 21 Oktober). *Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup*. Refugees International. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/10/18/dire-consequences-addressing-the-humanitarian-fallout-from-myanmars-coup>
- Mezzera, M. (2021, 4 Mei). *A Closer Look at 5 Regional Responses to the Myanmar Coup*. Clingendael Spectator. <https://spectator.clingendael.org/en/publication/closer-look-5-regional-responses-myanmar-coup>
- BBC. (2021, 11 Februari). *Myanmar coup: US announces sanctions on leaders*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749>
- Adkins, W. (2021, 1 Februari). *EU leaders condemn military coup in Myanmar*. Politico. <https://www.politico.eu/article/europe-reacts-to-myanmar-military-coup/>
- DW. (2021, 22 Maret). *EU imposes sanctions in response to Myanmar coup*. <https://www.dw.com/en/eu-imposes-sanctions-in-response-to-myanmar-coup/a-56948456>
- Min, M. (2022, 22 Maret). *India's cautious approach to the military coup in Myanmar*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2022/03/22/indias-cautious-approach-to-the-military-coup-in-myanmar/>
- The Straits Times. (2021, 8 Mei). *Myanmar junta designates shadow government as a 'terrorist' group*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-junta-designates-shadow-government-as-a-terrorist-group>
- Hein, Y. M. (2022). *The Root Causes of Myanmar's Coup Go Deeper*. Wilson Center. [https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/2022-03-Myanmar\\_YeMyoHein.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/2022-03-Myanmar_YeMyoHein.pdf)



- Hein, Y. M. (2022). *One Year On: The Momentum of Myanmar's Armed Rebellion*. Wilson Center. [https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ASIA\\_220519\\_1YearOn-BRIEF\\_V1r2.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ASIA_220519_1YearOn-BRIEF_V1r2.pdf)
- Congressional Research Service. (2021, 12 Mei). *Coup in Burma: Implications for Congress*. <https://sgp.fas.org/crs/row/R46792.pdf>
- Banerjee, S. & Bhowmick, S. (2022, 15 Juni). *Myanmar: Coup, COVID-19, and the ongoing economic crisis*. Observer Research Foundation (ORF). <https://www.orfonline.org/expert-speak/coup-covid-19-and-the-ongoing-economic-crisis/>
- Nadi, K. (2022, 19 Mei). *How ASEAN's Failed 'Five-Point Consensus' Has Let Down the People of Myanmar*. The Wire. <https://thewire.in/south-asia/how-aseans-failed-five-point-consensus-has-let-down-the-people-of-myanmar>
- Sulaeman, F. H. (2021, 1 Juli). *Versailles in Repeat: The Failure of ASEAN's Five-Point Consensus. Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2021/07/01/versailles-in-repeat-the-failure-aseans-five-point-consensus/>
- Houston, K. (2022, 11 Oktober). *Qualitative data-collection methods*. Jotform. <https://www.jotform.com/blog/qualitative-data-collection-methods/>
- Aljazeera. (2022, 3 Agustus). *Why is the Myanmar crisis such a challenge for ASEAN?* <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/why-is-the-myanmar-crisis-such-a-challenge-for-asean>
- Aljazeera. (2022, 11 November). *Southeast Asia leaders struggle with Myanmar crisis at summit*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/11/southeast-asia-leaders-struggle-with-myanmar-crisis-at-summit>

Aljazeera. (2022, 28 Oktober). *Myanmar warns ASEAN that pressure would be counterproductive*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/28/myanmar-warns-asean-that-pressure-for-peace-is-counterproductive>

Chan, D. S. W. (2021, 2 September). *Business as Usual: Chinese Investments After the Myanmar Coup*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/09/business-as-usual-chinese-investments-after-the-myanmar-coup/>

Radio Free Asia (RFA). (2023, 22 Februari). *India is keeping close ties with Myanmar, even transferring weapons, NGOs say*. <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/india-burma-02222023180530.html>

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2021, 8 Juni). *Wang Yi Meets with Myanmar's Foreign Minister U Wunna Maung Lwin*. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/gjhdq\\_665435/2675\\_665437/2747\\_66349\\_8/2749\\_663502/202106/t20210609\\_9168709.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2747_66349_8/2749_663502/202106/t20210609_9168709.html)

Byrd, M. (2023, 1 Februari). *Myanmar Economy in Tailspin, 2 Years after the Military Coup*. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. <https://dkiapcss.edu/myanmar-economy-in-tailspin-2-years-after-the-military-coup/>

### ***Policy Paper***

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pakarti Centre. (2022, Oktober). *Seeking Strategic Options for Myanmar: Reviewing Five-Point Consensus and Anticipating the Future of Democracy in Myanmar*.

Roza, R. (2021, Februari). *Military Coup in Myanmar: A Test for ASEAN*. Info Singkat: A Brief Study of Actual and Strategic Studies. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-244-EN.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-244-EN.pdf)

- Passeri, A. (2021). *The Domestic and International Implications of Myanmar's 2021 Military Coup*. IKMAS Working Paper 1/2021. <https://www.ukm.my/ikmas/wp-content/uploads/2021/09/IKMAS-Working-Paper-2021-Passeri-Myanmar-Full-Version.pdf>
- Marchi, L. (2014). *ASEAN vis-à-vis Myanmar: what influences at play?* The London School of Economics and Political Science, Centre for International Studies. <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/64792>

### **Buku**

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc. [https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design\\_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf](https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf)
- Muller, A. R. (2004). *The Rise of Regionalism: Core Company Strategies under the Second Wave of Integration*. Erasmus Research Institute of Management (ERIM).